

# TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN EKONOMI

Oleh: Komaruddin Sastradipoera \*)

## ABSTRAK

Pembangunan tidak boleh terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar. Pembangunan perlu meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyebarkannya. Ada kebutuhan sosial yang mendalam untuk berpartisipasi dalam membentuk dasar eksistensinya sendiri dan menyumbangkan pemikiran untuk nasib dunia masa depan. Demikian beberapa dari Deklarasi Cocoyoc. Pembangunan pendidikan terutama harus ditujukan untuk meningkatkan harga-diri (*self-esteem*) dan percaya-diri (*self-reliance*) yang secara fundamental merupakan upaya untuk menyesuaikan penampilan dengan nilai-nilai dalam keseimbangan berkomunikasi dan bertransaksi yang kemudian seringkali disebut pemberdayaan sosio-kultural (*socio-cultural empowerment*). Titik-berat konsep pemberdayaan sebaiknya tidak hanya ditekankan kepada peningkatan keberdayaan kasual, tetapi terutama peningkatan keberdayaan struktural. Penjabaran kedua tujuan pembangunan pendidikan tersebut melahirkan "delapan kardinal tujuan pendidikan ekonomi."

Perseorangan maupun masyarakat membutuhkan pemuas kebutuhan dasar (*basic needs*) yang di antaranya meliputi makanan, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Proses pertumbuhan ekonomi yang menjauhi tujuan esensial ini (lebih-lebih jika dengan sengaja atau tidak sengaja menghancurkannya) dapat dianggap (oleh permufakatan para sosiolog internasional di Meksiko, yang dikenal dengan Deklarasi Cocoyoc 1974 yang ditunjang oleh UNCTAD dan program lingkungan PBB), sebagai kebijaksanaan yang menentang konsep pembangunan yang sesungguhnya.<sup>1</sup>

Berhubungan dengan problematika pembangunan yang kian kompleks, Deklarasi Cocoyoc lebih jauh mengemukakan bahwa kita masih berada dalam suatu tahapan yang masalah utamanya adalah pembangunan, yaitu sejauhmana pembangunan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat termiskin yang mencakup 40 persen dari penduduk.

### Perbaikan Mutu Kehidupan Kelompok Termiskin

Deklarasi Cocoyoc yang terkenal itu selanjutnya menambahkan bahwa tujuan utama pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak bergeser dari upaya untuk menjamin perbaikan hidup kelompok termiskin. Karena itu, setiap kebijaksanaan dan proses per-

tumbuhan yang ternyata hanya berpihak kepada sebagian kecil penduduk yang telah kaya dan kemudian semakin memperlebar jurang kesenjangan antarnegara maupun antargolongan masyarakat dalam suatu negara, harus dianggap sebagai kebijaksanaan dan proses yang bukan pembangunan dalam arti yang sesungguhnya. Atau, seperti disarankan oleh Mazhab

\*) Komaruddin Sastradipoera adalah Guru Besar Ekonomi dan Manajemen UPI, Dosen Program Administrasi Perkantoran, Dosen PPS UPI

<sup>1</sup> Deklarasi Cocoyoc menghasilkan pemufakatan para sosiolog internasional yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1974 di Cocoyoc, Meksiko. Diskusi yang dipimpin oleh Barbara Ward itu ditunjang oleh UNCTAD dan program Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Historis Jerman (1840-1915), sekalipun tidak benar-benar identik, bahwa ekonomi politik (*Politischen Oekonomie*) sebenarnya mempunyai tugas etis. Ekonomi politik, berdasarkan etika seperti itu, harus menentukan standar produksi dan distribusi kesejahteraan “orang kebanyakan” (*commonman*) yang layak hingga tuntutan keadilan dan moralitas terpenuhi.<sup>2</sup> Kebijakan tersebut, menurut mereka, akan memperkokoh kesetiaan kepada negara yang dengan serta-merta dapat menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan efisiensi para buruh pabrik yang pada jaman Klasik berkuasa (1776-1871) terpinggirkan.

Deklarasi Cocoyoc pun tidak pernah mempercayai akan kemujaraban konsep “rembesan ke bawah” (*trickle-down effect*) yang pernah dikumandangkan oleh administrasi pemerintahan Presiden Ronald Reagan dan konsep “pertumbuhan dahulu, kemudian keadilan” yang dianut oleh administrasi pemerintahan Presiden Muhammad Soeharto di masa Orde Baru yang pernah berkuasa selama tiga puluh dua tahun. Konsep pertama (konsep rembesan ke bawah) hanya dapat berhasil jika *mobilitas vertikal* antarlapisan masyarakat cukup tinggi. Atau, jika dilihat dari psikologi massa, *kapilariomotor* (yaitu pendorong dinamika sosial untuk mencapai tahap hidup yang lebih tinggi), yang menunjukkan kadar yang sangat kuat. Dan, konsep “pertumbuhan dulu, keadilan kemudian” agaknya hanya dapat dipertahankan jika di dalam masyarakat telah tersedia pranata sosial yang dapat menjamin mekanisme distribusi pendapatan yang mampu menyebarkan hasil-hasil pembangunan dalam kadar yang lebih luas. Prasyarat-prasyarat yang melekat pada kedua konsep di atas, tampaknya tidak terpenuhi di dalam kehidupan sosial-politik negara kita. Dalam kenyataannya di negara

<sup>2</sup> Komaruddin Sastradipoera, *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijakan Ekonomi*, Penerbit Kappa-Sigma, Bandung 2001, h.60.

kita, konsep “tetesan ke bawah” cenderung menjadi “tetesan ke atas” karena munculnya para monopolis yang menguasai sumber-sumber daya ekonomi dan marketing. Sedangkan konsep “pertumbuhan dahulu, keadilan kemudian,” menyebabkan keresahan politik yang disusul dengan jatuhnya Orde Baru.

### **Martabat Manusia**

Ada beberapa gagasan yang dicetuskan oleh Deklarasi Cocoyoc yang bersifat universal. Menurut deklarasi itu “pembangunan tidak boleh terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar.” Pembangunan perlu meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyebarkannya. Demikian pula halnya dengan hak untuk mengajukan gagasan dan saran serta mempertahankannya. Pernyataan yang berhubungan dengan martabat manusia dikemukakan dengan mengatakan, “Ada kebutuhan sosial yang mendalam untuk berpartisipasi dalam membentuk dasar *eksistensinya sendiri* dan menyumbangkan pemikiran untuk nasib dunia masa depan.”

Bagi deklarasi pembangunan sebagai hak untuk memperoleh pekerjaan harus diartikan sebagai kebijaksanaan yang berkilat tidak hanya pada pekerjaan untuk memperoleh sebungkus nasi dan seekor ikan asin, namun juga suatu pekerjaan yang mampu memberikan peluang *untuk menemukan pembentukan pribadinya*. Barangkali, dalam hubungan inilah pembangunan, dan khususnya pembangunan pendidikan, harus menjadi proses yang dapat mempengaruhi transformasi struktural dan institusional sehingga dengan cara yang sangat efisien dapat membangun martabat dan membangkitkan rasa percaya diri. Dan, sekalipun mungkin dapat dianggap terlalu berharap, pembangunan pendidikan pun seyogianya dapat mengadakan reformasi sifat dasar masyarakat agar sesuai dengan perubahan yang dinamis.

Kendatipun model pendekatan pembangunan di atas seolah-olah memiliki kecenderungan untuk mengangkat martabat manusia ke tempat amat tinggi (karena itu mungkin terjatuh kembali pada pendekatan linier), tetapi hendaknya dikemukakan pula bahwa setiap pembangunan pada dasarnya harus menjauhkan diri dari sikap anti-pertumbuhan. Kata Senghaas, yang dikritik adalah fetisisme pertumbuhan, yaitu keyakinan akan pengaruh perluasan sosial yang akan terjadi dengan sendirinya dari suatu pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan. Penulis itu pun menambahkan bahwa sisi lain dari kritik ini "adalah upaya untuk merumuskan program pembangunan yang selaras dengan dasar pertumbuhan ekonomi yang memiliki dua tujuan politik pembangunan utama: pengikutsertaan massa manusia dalam suatu kegiatan yang produktif dan pemenuhan kebutuhan dasar".<sup>3</sup>

Konsep mutakhir di atas muncul sebagai antitesis atas kemacetan struktural yang jikalau digeneralisasi merupakan kekurangmampuan dalam menentukan diri sendiri (*self determination*). Kekurangmampuan untuk menentukan diri sendiri itu merupakan salah satu fenomena dari ketergantungan suatu lapisan masyarakat atau suatu bangsa kepada masyarakat atau bangsa lain yang seringkali berakar pada proses historis yang panjang. Oleh sebab itu, ketergantungan ekonomi suatu masyarakat atau suatu bangsa dapat dipastikan mempunyai aspek pendidikan, dalam arti hilangnya kemampuan untuk menentukan diri sendiri yang merupakan salah satu tujuan pendidikan ekonomi yang utama.

Masyarakat atau bangsa yang memiliki kadar ketergantungan yang tinggi, merupakan masyarakat atau bangsa yang mengalami *masifikasi*, yaitu masyarakat atau bangsa yang menurut Frerie, berhasil memasuki proses sejarah, namun karena

<sup>3</sup> Dieter Senghaas, *Tata Ekonomi dan Politik Pembangunan; Pledoi untuk disosiasi* (penerjemah Aan Effendi), LP3ES, 1988, hh. 319-24

manipulasi, mereka menjadi kelompok yang tidak mampu berpikir dan oleh sebab itu mudah dikendalikan. Sementara itu, pembangunan pendidikan justru merupakan proses untuk mencapai kesadaran kritis, yang disebut oleh penulis itu sebagai "konsientisasi" (*conscientizacau*) "yang mencerminkan perkembangan bangkitnya kesadaran." Perkembangan tersebut timbul bukan sebagai hasil sampungan yang serta-merta muncul dari kemajuan ekonomi, namun perkembangan yang disengaja melalui upaya pendidikan yang kritis yang mesti didukung oleh kondisi sejarah yang memadai.<sup>4</sup>

Perlu diakui kiranya, bahwa perkembangan menuju kesadaran kritis (konsientisasi) tersebut tidak akan terjadi dengan sendirinya, seperti terbitnya matahari di ufuk Timur setiap pagi dan terbenam di ufuk Barat setiap petang. Oleh karena itu agar tingkat kesadaran kritis itu tercapai kita membutuhkan program pendidikan yang aktif dan dialogis. Melalui program seperti itu proses masifikasi dapat dihindari. Dan, dalam situasi seperti itu, kita membutuhkan pemecahan masalah yang tepat, suatu pemecahan yang berlangsung *bersama dengan rakyat*, bukan pemecahan masalah *untuk* rakyat.

Konsep di atas perlu dijelaskan. Dalam pendekatan "pemecahan bersama dengan rakyat" di situ rakyat memiliki fungsi *partisipatif*, khususnya partisipasi dalam proses pembuatan keputusan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, pendekatan "pemecahan untuk rakyat" berangkat dari anggapan bahwa rakyat adalah obyek, sementara para pendidik sebagai subyek pembangunan. Rakyat dalam "pemecahan untuk rakyat" berada

<sup>4</sup> Komaruddin Sastradipoera, "Martabat Manusia dalam Pembangunan Pendidikan," *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II*, Medan, 4-8 Februari 1992. Uraian lebih jauh dapat dikaji dari buku Paulo Frerie, *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*, (penerjemah Alois A. Nugroho), PT. Gramedia, Jakarta 1984, hh. 3-20

dalam posisi subordinat yang serba tidak tahu dan tak berdaya, sementara para pendidik berada dalam posisi superordinat yang serba tahu dan mempunyai kekuasaan yang menentukan. Dengan demikian konsep "pemecahan untuk rakyat" menyebabkan rakyat tidak akan pernah dewasa dalam menentukan nasibnya sendiri.

Akibatnya, jika kita mengikuti jalan pikiran di atas, yang perlu diperbuat oleh para pendidik adalah mengajak mereka untuk memasuki proses sejarah dengan kritis. Artinya, kita mengajak mereka agar bukan sekadar dapat bertahan hidup dalam posisi subsistensi dan beradaptasi, tetapi terutama mampu *bereksistensi* (atau lebih tepat: *berhistorisasi*) sebagai subyek yang memiliki martabat yang setara dan seimbang baik dalam komunikasi sosial-kultural maupun dalam transaksi ekonomis, baik dalam kadar nasional maupun global. Pendekatan inilah yang membawa umat manusia kepada suatu kedudukan yang bermartabat. Dan, jika hal itu diterjemahkan dalam pengertian-pengertian ekonomis: transaksi di pasar akan menjadi lebih bermutu jika semua partai pasar memiliki kekuatan yang setara dan mempunyai horizon pilihan yang lebih luas. Dengan perkataan lain tujuan kebijaksanaan ekonomi dapat dicapai, bukan saja oleh pertumbuhan ekonomi (yang ditandai oleh naiknya produktivitas marjinal modal, buruh, dan teknologi, seperti pernah dikemukakan oleh model Cobb-Douglas dan mazhab Neo-Klasik) dan stabilitas ekonomi (yang ditandai oleh arus uang dan arus barang yang mantap dan dinamis), tetapi terutama oleh semakin baiknya keadilan dan kemerdekaan ekonomi.

#### **Delapan Kardinal Tujuan Pembangunan Pendidikan Ekonomi**

Dilihat dari sudut sejarah dan masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara Dunia Ketiga, agaknya kita akan terjebak ke dalam kesalahan konseptual jika pemba-

ngunan pendidikan ekonomi hanya ditujukan untuk mengembangkan efisiensi, produktivitas dan daya saing individual. Konsep itu mengandung beberapa hal yang terabaikan. Pembangunan pendidikan terutama harus ditujukan untuk meningkatkan harga-diri (*self-esteem*) dan percaya-diri (*self-reliance*) yang secara fundamental merupakan upaya untuk menyesuaikan penampilan dengan nilai-nilai dalam keseimbangan berkomunikasi dan bertransaksi yang kemudian seringkali disebut pemberdayaan sosio-kultural (*socio-cultural empowerment*). Titik-berat konsep pemberdayaan sebaiknya tidak hanya ditekankan kepada peningkatan keberdayaan kasual, tetapi terutama peningkatan keberdayaan struktural.

Jika kedua tujuan pembangunan pendidikan (peningkatan harga-diri dan percaya-diri) tersebut kita jabarkan, maka lahirlah apa yang disebut "delapan kardinal tujuan pendidikan ekonomi." Kedelapan kardinal tujuan ekonomi itu meliputi:<sup>5</sup>

1. **Pengembangan kesadaran-diri.** Pengembangan kesadaran-diri (*self-consciousness*) yang merupakan kesadaran akan eksistensi dan historisasi seseorang sebagai individu yang unik, atau apa yang disebut "konsientisasi," yaitu kemampuan untuk merefleksikan diri dan kemampuan untuk mengadakan pilihan bebas.
2. **Pengembangan kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri.** Pengembangan kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri oleh pengendalian langsung dari dalam (*inner-directed controls*) yang bukan sebagai suatu produk dari tekanan sosial, atau dengan singkat: kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri (*self-direction*).
3. **Pengembangan kemampuan untuk mengekspresikan diri.** Kemampuan

<sup>5</sup> Komaruddin Sastradipoera, *op.cit.*, hh. 5-7.

untuk mengekspresikan diri (*self-expression*) merupakan kemampuan untuk menyatakan diri, suatu kemampuan yang muncul bukan atas "hubungan klien dengan patron," hubungan obyek dan subyek, hubungan subordinat dan superordinat. Atau, jika menggunakan istilah-istilah dari Argyris, dari pasivitas ke aktivitas, dari ketergantungan ke kebebasan, dari kurang sadar-diri ke sadar dan pengendalian diri. Konsep kemampuan mengekspresikan diri merupakan penolakan terhadap apa yang disebut penyakit *representativisme*. *Representativisme* adalah suatu perilaku masyarakat, yang karena mempunyai kelemahan dan ketidakberdayaan dalam mengekspresikan diri,<sup>6</sup> mereka selalu membutuhkan seorang wakil untuk mengaktualisasikan dirinya ketika harus membuat keputusan, sekalipun keputusan itu untuk diri mereka sendiri.

4. **Pengembangan kemampuan pemenuhan-diri.** Pengembangan kemampuan pemenuhan-diri (*self-fulfillment*) merupakan pengembangan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk meraih segala hal yang mampu dicapainya melalui pilihan pekerjaan yang disukainya. Dengan pengembangan kemampuan pemenuhan-diri ini manusia akan melepaskan diri dari dependensi dalam memilih pekerjaan. Ia mampu menentukan dan menciptakan untuk dirinya sendiri (*self-employment*).
5. **Pengembangan kemampuan aktualisasi-diri.** Pengembangan kemampuan aktualisasi-diri (*self-actualization*) merupakan kecenderungan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan, pemenuhan potensialitas individu dan realisasi-diri (*self-realization*). Atau, jika menggunakan teori hierarki motivasi

---

<sup>6</sup> Chris Argyris, *Personality and Organization*, Harper & Row, Publishers, incorporated New York, 1957, h. 50.

Maslow: pengembangan peluang untuk mengembangkan kemampuan.<sup>7</sup>

6. **Pengembangan kemampuan analisis-diri.** Pengembangan kemampuan analisis-diri (*self-analysis*) merupakan upaya pendidikan ekonomi agar seorang individu memahami dirinya sendiri, motivasinya, emosinya, potensinya, dan keterbatasannya. Manusia perlu memahami kekuatan-kelemahan dan kesempatan-ancaman (*strengths-weaknesses and opportunities-threats, SWOT*) di dalam dan terhadap dirinya sehingga ia dapat merumuskan tujuannya sendiri.
7. **Pengembangan kemampuan pengendalian-diri.** Pengembangan kemampuan pengendalian-diri (*self-control*) merupakan pengembangan kemampuan untuk membimbing perilakunya sendiri. Seseorang yang telah mampu mengendalikan diri dianggap sebagai orang yang telah dewasa dalam memilih tindakannya.
8. **Pengembangan kemampuan pertumbuhan-diri.** Pengembangan kemampuan pertumbuhan-diri (*self-development*) merupakan pengembangan kemampuan untuk menumbuhkan potensi dan kemampuannya sendiri. Kemampuan pertumbuhan-diri yang telah mapan menunjukkan kemampuan merealisasikan segenap potensi dalam diri yang positif. Ia perlu menyadari potensi yang melekat pada kekuatan lahiriahnya, sehingga karena itu ia tidak menyia-nyaikan potensi yang sangat berharga tersebut.

---

<sup>7</sup> Abraham H. Maslow, "A theory of Human Motivation," *Psychological Review*, vol. 50, No. 4, July 1943, h. 375. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang teori-teori motivasi, lihat Komarudin, *Manajemen Berdasarkan Sasaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hh. 35-37.

Kedelapan kardinal tujuan pendidikan ekonomi, atau katakanlah konsep "8 diri" (*the 8 selfs*), seperti telah dikemukakan, merupakan tujuan-tujuan yang mendukung dua buah tujuan pendidikan ekonomi secara umum, yaitu: pengembangan harga-diri (*self-esteem*) dan pengembangan percaya-diri (*self-reliance*).

Bumi Siliwangi, 1 juli 2002

#### **Kepustakaan Acuan**

- 1) Deklarasi Cocoyoc menghasilkan pemu-fakatan para sosiolog internasional yang diselenggarakan pada bulan Ok-tober 1974 di Cocoyoc, Meksiko. Diskusi yang dipimpin oleh Barbara Ward itu ditunjang oleh UNCTAD dan program Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 2) Komaruddin Sastradipoera, *Sejarah Pe-mikiran Ekonomi; Suatu Pengantar Teo-ri dan Kebijaksanaan Ekonomi*, Penerbit Kappa-Sigma, Bandung 2001, h.60.
- 3) Dieter Senghaas, *Tata Ekonomi dan Politik Pembangunan; Pledoi untuk Disosiasi* (penerjemah Aan Effendi), LP3ES, 1988, hh. 319-24
- 4) Komaruddin Sastradipoera, "Martabat Manusia dalam Pembangunan Pendi-dikan," *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II*, Medan, 4-8 Februari 1992. Uraian lebih jauh dapat dikaji dari buku Paulo Frerie, *Pendidikan sebagai Prak-tek Pembebasan*, (penerjemah Alois A. Nugroho), PT Gramedia, Jakarta 1984, hh. 3-20
- 5) Komaruddin Sastradipoera, *op.cit.*, hh. 5-7.
- 6) Chris Argyris, *Personality and Organi-zation*, Harper & Row, Publishers, Incor-porated New York, 1957, h. 50.
- 7) Abraham H. Maslow, "A Theory of Hu-man Motivation," *Psychological Review*, vol. 50, No. 4, July 1943, h. 375. Un-tuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang teori-teori motivasi, lihat Komaruddin, *Menejemen Berda-sarkan Sasaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hh. 35-37.